

Implementasi Program Ketahanan Pangan Ternak Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

* Olfan Rendi¹, Rijalul Fikri²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : olfanrendi@student.uir.ac.id

Abstrak

Program ketahanan pangan belum memberikan kontribusi bagi masyarakat pada kelompok tani di Desa, sehingga sebagian Desa belum mengikuti program tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta faktor hambatan Implementasi Program Ketahanan Pangan Ternak Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan bahwasanya Implementasi Program Ketahanan Pangan Ternak Di Desa Kesumbo Ampai belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan pembinaan, pelatihan serta pengawasan belum dilakukan. Kesimpulan Implementasi Program Ketahanan Pangan Ternak Di Desa Kesumbo Ampai belum berlangsung dengan maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh kepala Desa guna masyarakat agar masuk pada kelompok Tani, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ketahanan pangan dan kurangnya lahan untuk pakan ternak sehingga kadang pelaksana program sulit untuk mencarinya. Saran peneliti yaitu pemerintah desa Kesumbo Ampai dan ketua kelompok masyarakat penerima program untuk memberikan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, sebaiknya masyarakat meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Ketahanan Pangan.

Abstract

The food security program has not yet contributed to the farming community in the village, so some villages have not participated in the program. The purpose of this study is to identify the obstacles to the implementation of the Livestock Food Security Program in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The discussion shows that the implementation of the Livestock Food Security Program in Kesumbo Ampai Village has not been carried out optimally because guidance, training, and supervision have not been provided. Conclusion: The implementation of the Livestock Food Security Program in Kesumbo Ampai Village has not been maximized due to the lack of socialization by the village head to encourage the community to join farmer groups, the lack of community participation in the implementation of the food security program, and the lack of land for livestock feed, which sometimes makes it difficult for program implementers to find it. The researcher's suggestion is for the Kesumbo Ampai village government and the head of the community group receiving the program to provide regular socialization to the community, and for the community to increase their participation in the implementation of the food security program.

Keywords: Implementation, Policy, Food Security Program.

PENDAHULUAN

Program ketahanan pangan Pada periode 2022–2024, ketahanan pangan menjadi salah satu fokus dalam agenda pembangunan nasional. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan bahan pangan, mempermudah akses masyarakat terhadap pangan bergizi, dan meningkatkan mutu konsumsi. Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah mengembangkan kawasan lumbung pangan atau *food estate* di sejumlah wilayah di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 4, ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan mulai dari tingkat negara hingga individu. Pemenuhan tersebut tercermin dalam ketersediaan pangan yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitas, aman dikonsumsi, beragam, bergizi, merata, mudah dijangkau, serta tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 Tahun 2022, telah ditetapkan pedoman pelaksanaan program ketahanan pangan di desa. Fokus utamanya mencakup pemenuhan kebutuhan pangan warga, kemandirian desa dalam hal pangan, serta penghapusan kerawanan pangan. Kebijakan ini juga mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program tersebut, termasuk penyediaan sumber pangan hewani.

Berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN tahun 2022, desa-desa diwajibkan mengalokasikan setidaknya 20 persen dari total Dana Desa untuk program ketahanan pangan, termasuk aspek pangan hewani.

Pemerintah telah mengatur tata kelola Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian tahun 2024 melalui Permentan No. 2 Tahun 2024. Aturan ini memberikan arahan detail mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan di daerah.

Menurut Dinas Ketahanan Pangan (2020), peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani baik secara langsung maupun melalui dampak berantai turut membantu menekan angka kemiskinan, terutama di kawasan pedesaan. Kabupaten Bengkalis di Riau memiliki karakter geografis dan administratif yang unik. Ibu kotanya, yakni Bengkalis Kota, menjadi pusat aktivitas wilayah. Wilayah kabupaten ini meliputi daratan timur Sumatera sekaligus sejumlah pulau, dengan luas sekitar 6.973 km² (Ensiklopedia Dunia). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, estimasi jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis mencapai sekitar 671.730 jiwa pada pertengahan tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat 1 Huruf b, mengenai petunjuk operasional fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024, prioritas alokasi dana desa diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan pangan hewani.

1. Secara garis besar, tujuan pembangunan ketahanan pangan meliputi:
2. Mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan guna menjamin ketersediaan pasokan pangan bagi seluruh penduduk, dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, keberagaman, keamanan, serta keterjangkauan harga sepanjang waktu.
3. Meningkatkan pendapatan petani beserta keluarganya agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai taraf hidup yang lebih sejahtera.

Kecamatan Bathin Solapan merupakan salah satu daerah administratif di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang terletak di daratan timur Pulau Sumatera. Ditetapkan sebagai kecamatan mandiri pada tahun 2015 setelah pemekaran dari Kecamatan Mandau, ibu kotanya berada di Desa Sebangar. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkalis, luas wilayah kecamatan ini sekitar 673,7 km², mencakup 13 desa, dan memiliki estimasi populasi mendekati 98.600 jiwa per pertengahan tahun 2024.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seluruh desa di kecamatan ini secara aktif menjalankan program ketahanan pangan yang bersumberkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari jumlah anggaran yang dialokasikan, sebanyak 20% dikhususkan untuk meningkatkan program ketahanan pangan di setiap desa. Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, akses, dan kestabilan pangan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Bathin Solapan.

Tabel. 1.
Data Ketahanan Pangan Desa Se-Kecamatan Bhatin Soalpan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Nama Desa	Jenis Ketahanan Pangan	Jumlah Kelompok Penerima	Kontribusi PAD Desa	Jumlah Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan
Desa Petani	Kelompok Tani Ubi	1 Kelompok	Belum Ada	90.000.000	Belum
	Kelompok Ternak Sapi	1 Kelompok	Belum Ada	120.000.000	Belum
	Kelompok Ternak Kambing	1 Kelompok	Belum Ada	117.250.000	Belum
Desa Air Kulim	Perkembang-biakan Sapi	2 Kelompok	Belum Ada	215.650.000	Sudah Terlaksana
	Budidaya Ikan Gurami	1 Kelompok	Belum Ada	55.550.000	Sudah Terlaksana
Desa Buluh Manis	Budidaya Ikan Nila	1 Kelompok	Belum Ada	199.917.000	Belum Terlaksana
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Budidaya Ikan Nila	1 Kelompok	-	10.000.000	Belum Terlaksana
Desa Bumbung	Kelompok Pengembangan Dan Pengemukan Sapi	3 Kelompok	Belum Ada	248.831.200	Belum Terlaksana
Desa Pamesi	Kelompok Pengembangan Dan Penggemukan Sapi	1 Kelompok	Belum Ada	202.350.000	Sudah Terlaksana
Desa Kesumbo Ampai	Kelompok Tani Penggemukan Domba	1 Kelompok	Ada	193.400.000	Sudah Terlaksana
Desa Bhatin Sobanga	Bhatin Sobanga Jaya (Penggemukan Sapi)	1 Kelompok	Tidak Ada	213.726.000	Belum Terlaksana
Desa Sebangar	Penggemukan Peternak Sapi	1 Kelompok	Tidak Ada	219.410.000	Sudah Terlaksana
Desa Boncah Mahang	Perkembang-biakan Kambing	1 Kelompok	Tidak Ada	278.199.000	Sudah Terlaksana
		1 Kelompok	Tidak Ada	58.631.000	Sudah Terlaksana

Nama Desa	Jenis Ketahanan Pangan	Jumlah Kelompok Penerima	Kontribusi PAD Desa	Jumlah Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan
	Budidaya Ayam Mardi				

Berdasarkan data tahun 2024, Desa Kesumbo Ampai di Kecamatan Bathin Solapan telah mengimplementasikan program strategis untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.

METODE

Pada penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis suatu peristiwa secara menyeluruh. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi fakta, realitas sosial, aktivitas manusia, perilaku, serta beragam persepsi dan sudut pandang yang muncul dari keterlibatan para pihak dalam konteks yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2019) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Key Informan diambil dari Ketua pelaksana program ketahanan pangan Desa Kesumbo Ampai, dan yang menjadi informan yaitu Kepala Desa Kesumbo Ampai, dan Masyarakat Desa Kesumbo Ampai. Analisis data pada penelitian ini adalah dengan Reduksi Data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Wahab (dalam Jumroh & Yoga, 2021:113) mengemukakan bahwa implementasi adalah proses menjalankan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah, keputusan eksekutif yang penting, atau putusan pengadilan. Kebijakan tersebut mencakup identifikasi masalah yang akan diselesaikan serta berbagai pendekatan dalam merancang dan mengelola proses pelaksanaannya.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Meutia, 2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pemanfaatan sumber daya secara strategis untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat atau pemerintah. Mereka juga memandang kebijakan publik sebagai upaya intervensi berkelanjutan dari pemerintah guna membantu kelompok masyarakat yang kurang berdaya agar dapat bertahan hidup dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Pramono (2020:41–42) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan memiliki peran yang lebih penting dibandingkan pembuatannya. Tanpa pelaksanaan, kebijakan hanya akan menjadi rencana atau cita-cita yang tersimpan tanpa realisasi. Tahap implementasi, sebagai bagian krusial dari keseluruhan struktur kebijakan, dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Udoji (dalam Sawir, 2021) berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan memiliki peranan yang sangat krusial, bahkan bisa lebih penting daripada proses penyusunannya. Tanpa pelaksanaan, kebijakan hanya akan menjadi rencana atau cita-cita yang tersimpan tanpa pernah terwujud.

Menurut Menurut Meerie S. Grindle (dalam Seniat, 2022:25), keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan, yang mencakup dua aspek utama, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasinya. Unsur isi kebijakan meliputi:

1. Kepentingan yang terlibat dan memengaruhi proses kebijakan.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan.
3. Tingkat perubahan yang diharapkan.
4. Lokasi atau pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
5. Pihak pelaksana program.
6. Sumber daya yang dimanfaatkan.

Menurut Mahendradatta dkk.(2020:297) menjelaskan bahwa ketahanan pangan meliputi tersedianya pangan yang aman serta memiliki mutu yang layak untuk dikonsumsi.. Jika ketersediaan ini tidak terjaga, dapat mengakibatkan kehilangan pangan dalam jumlah signifikan. Kekurangan ketersediaan pangan juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang menurunkan produktivitas kerja, yang pada gilirannya memengaruhi kondisi ekonomi baik di tingkat keluarga maupun negara.

Adapun Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Kepentingan yang Mempengaruhi

Diketahui bahwa program ketahanan pangan ternak terkait penyediaan kebutuhan masyarakat yang masih kurang, implementasi program ini masih terdapat beberapa masalah seperti keterbatasan pakan ternak sehingga ternak yang disediakan terbatas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal fasilitas atau kebutuhan yang diberikan pemerintah kepada pelaksana sudah terlaksana, namun dengan adanya keterbatasan pakan ternak, maka para pelaksana membatasi jumlah ternak sehingga kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara maksimal.

2. Tipe Manfaat

Diketahui bahwa program ketahanan pangan ternak yang diimplementasikan ini memiliki dampak manfaat yang signifikan terhadap masyarakat Desa Kesumbo Ampai salah satunya meningkatkan taraf hidup bagi petani maupun masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa program ini dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Desa Kesumbo Ampai serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian desa secara berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan desa.

3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Diketahui bahwa program ketahanan pangan ternak yang diimplementasikan ini sejauh apa bentuk perubahan yang diberikan sudah dapat dilihat seperti peningkatan jumlah pendapatan masyarakat, peningkatan jumlah pendapatan desa dan menurunkan angka pengangguran yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa program ini sudah memberikan bentuk perubahan yang cukup jauh bagi masyarakat desa dan pemerintah desa dalam peningkatan pendapatan peternak dan peningkatan jumlah ternak dan peningkatan produktivitas ternak.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Diketahui bahwa bahwa program ketahanan pangan ternak yang diimplementasikan ini dalam stakeholder pengambilan keputusan pemerintah desa sudah memberikan yang terbaik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa diketahui program ketahanan pangan ternak yang diimplementasikan ini dalam pengambilan

keputusan/kebijakan sudah memberikan yang terbaik untuk perkembangan program dan kesejahteraan masyarakat dengan didukung pemerintah desa memberikan kebijakan yang terlaksana dalam bentuk kebijakan yang diberikan.

5. Pelaksanaan Program

Diketahui bahwa bahwa pelaksana program bahwa dalam program ketahanan pangan ini sudah terlaksana dengan baik yang dimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjalankan program ketahanan pangan ini sudah memberikan terlaksana seperti penyediaan alat-alat perlengkapan program untuk menunjang pelaksanaan program ketahanan pangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa diketahui program ketahanan pangan ternak yang diimplementasikan program ketahanan pangan ini sudah terlaksana dimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjalankan program ketahanan pangan ini sudah menyediakan alat-alat perlengkapan program untuk menunjang pelaksanaan program ketahanan pangan meskipun belum dilakukan secara merata sesuai kebutuhan masyarakat.

6. Sumber Daya yang Digunakan

Diketahui bahwa pengembangan sumber daya sudah terlaksana dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memberikan peningkatan sumber daya manusianya, seperti memberikan pelatihan dan bimbingan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan diketahui Pengembangan sumber daya sudah dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memberikan peningkatan sumber daya manusianya masyarakat peternak, dengan pemerintah memberikan pelatihan dan bimbingan terhadap penerima program tersebut.

7. Indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Diketahui bahwa program ketahanan pangan ternak yang diimplementasikan ini dalam stakeholder pengambilan keputusan pemerintah desa sudah memberikan yang terbaik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat serta mekanisme terkait program ketahanan pangan ini dan masyarakat penerima program dalam pelaksanaan program ini sudah berjalan dan terealisasi.

8. Karakteristik Lembaga Rezim Yang Berkuasa

Diketahui bahwa bahwa kelembagaan yang berkepentingan seperti pemerintah desa sudah memberikan yang terbaik seperti bantuan finansial, memberikan pelatihan agar sumber daya manusianya memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan ternak dan hal ini dapat menunjang keberhasilan program ketahanan pangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap program ketahanan pangan ternak di Desa Kesumbo Ampai. peran dari pemerintah desa terhadap program ketahanan pangan ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaannya. pemerintah desa sudah memberikan yang terbaik seperti bantuan finansial, memberikan pelatihan agar sumber daya manusianya memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan ternak dan hal ini dapat menunjang keberhasilan program ketahanan pangan tersebut.

9. Tingkat Kepatuhan

Diketahui bahwa tindak lanjut responnya, masyarakat terhadap program ketahanan pangan ini telah menerapkan ilmu yang diberikan secara konsisten dan menciptakan pakan yang baik, mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa respon yang diberikan pemerintah desa terhadap masyarakat penerima program ketahanan pangan ternak sudah memberikan bentuk respon yang baik seperti penyediaan sarana dan parasana, dan memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat penerima program begitu juga tindak lanjut responnya, masyarakat terhadap program ketahanan pangan ini telah menerapkan ilmu yang diberikan secara konsisten dan menciptakan pakan yang baik, mandiri dan berkelanjutan.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program ketahanan pangan ternak di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa program ketahanan pangan belum berjalan dengan maksimal dimana diketahui belum adanya tenaga khusus guna memberikan pembina atau pelatihan bagi setiap kelompok guna meningkatkan pengetahuan para kelompok penerima program ketahanan pangan, dukungan pelaksana program penyediaan mesin di setiap kelompok sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian implementasi program ketahanan pangan ternak di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan maksimal.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam implementasi program ketahanan pangan ternak di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis meliputi: a) Kurangnya strategi pemasaran dalam penjualan ternak sehingga kurang maksimalnya pendapatan yang didapatkan dari program ketahanan pangan ternak ini, b) Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan ini menjadi suatu penghalang utama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, c) Kurangnya fasilitas, seperti jumlah mesin pengolah pakannya masih satu unit, dan ini bisa dikatakan masih kurang, sehingga bila terjadi kerusakan pada mesin pengolah pakannya, maka pakan yang diolah terkendala sebelum mesin tersebut diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- A Jumroh & Yoga.(2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*.Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Mahendradatta, et.al (2020). *ketahanan dan keamanan pangan indonesia sekarang dan ke depan*. Makassar: PATPI.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis kebijakan publik*. Lampung: AURA
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Seniati. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur tentang Pangan.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di Desa.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2024 mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024